

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur hak mutu setiap warga negara yang menderita kelainan fisik, mental, emosional, dan intelektual. Undang-Undang Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang sama bagi anak-anak dengan perbedaan budaya, sosial, geografis dan bahasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dapat meningkatkan perkembangan, pengetahuan dan keterampilan anak (Setianingsih, 2017).

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang membuka kesempatan bagi seluruh peserta didik, baik yang memiliki kelainan maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat khusus, untuk mengikuti proses pendidikan atau pembelajaran bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu lingkungan pendidikan yang sama.

Menurut Akhiruddin (2015), pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan peserta didik dengan beragam kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan yang sama, disertai dukungan serta penyesuaian yang dibutuhkan agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pembelajaran.

Tujuan pendidikan inklusif adalah membangun lingkungan belajar yang terbuka, ramah, dan menghargai perbedaan, di mana setiap individu dipandang sebagai bagian penting dari komunitas pendidikan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, baik berupa disabilitas fisik, hambatan perkembangan, maupun kebutuhan pendidikan khusus lainnya, tidak dipisahkan dari siswa lainnya, melainkan diberi kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang secara maksimal.

Program pendidikan inklusi semakin berfokus pada kesejahteraan anak, memastikan bahwa kebutuhan setiap anak terpenuhi. Program pendidikan inklusi tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk semua anak, karena setiap anak memiliki karakteristik, keterampilan, dan nilai-nilai yang melekat pada semua anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia tercatat mencapai 1,6 juta jiwa. Dari total tersebut, hanya sekitar 18 persen yang telah memperoleh layanan pendidikan inklusif. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus menempuh pendidikan di SLB, sementara sekitar 299 ribu lainnya bersekolah di sekolah reguler yang menyelenggarakan program inklusi.

Untuk memastikan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merancang program Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah lembaga pendidikan umum (bukan SLB) yang juga menyediakan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Di lembaga ini, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa lainnya, dengan bantuan dari guru pendamping khusus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021, terdapat 2.250 sekolah ABK dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.017 adalah SLB. Sebaliknya, hanya sekitar 233 sekolah inklusi yang dapat menerima anak berkebutuhan pendidikan khusus di luar SLB. Kondisi ini masih jauh dari prevalensi jumlah ABK yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan.

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan melalui penerapan fungsi-fungsi manajerial, yang melibatkan interaksi saling memengaruhi, saling memberi arahan, serta saling melakukan pengawasan, sehingga seluruh kegiatan dan pencapaian kinerja organisasi pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran memerlukan sebuah pedoman yang berbentuk kurikulum. Kurikulum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pendidikan. Untuk mewujudkan amanat pendidikan, dibutuhkan instrumen yang mampu mengarahkan seluruh tujuan agar sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Semua aktivitas dalam lembaga pendidikan diatur oleh kurikulum ini untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 Ayat (19), konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai rencana, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum dalam pendidikan inklusi telah diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu dari setiap peserta didik berkebutuhan khusus, mengingat mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan, tantangan, serta gaya belajar masing-masing.

Sekolah inklusi dapat berjalan dengan baik, ketika memiliki manajemen sekolah yang baik. Kepala sekolah sebagai manajerial hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan tanggung jawab terhadap tugas tenaga kependidikan yang handal, sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, serta partisipasi masyarakat yang tinggi.

Dalam pendidikan inklusif, peran guru dan seluruh staf sekolah memiliki posisi yang sangat krusial. Mereka perlu dibekali dengan wawasan, keterampilan, serta pemahaman yang memadai agar dapat mendukung keberhasilan setiap peserta didik. Guru dituntut menerapkan strategi pembelajaran yang beragam, menyesuaikan dengan gaya belajar serta kebutuhan masing-masing siswa melalui pendekatan diferensiasi. Hal ini mencakup penerapan pembelajaran kolaboratif, pemanfaatan teknologi pendidikan secara tepat, serta penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan individu.

Selain itu, keterlibatan orang tua dan keluarga juga menjadi aspek penting dalam praktik pendidikan inklusif. Orang tua berperan sebagai mitra sekolah dalam menyusun rencana pendidikan anak dan memantau perkembangannya. Hubungan yang dilandasi komunikasi terbuka serta saling pengertian antara pihak sekolah dan orang tua sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, (Arif, 2012).

Agar kurikulum benar-benar berjalan sesuai tujuan pendidikan inklusif, sekolah memerlukan tenaga pendukung yang berperan secara langsung dalam mendampingi ABK, salah satunya adalah *shadow teacher* atau guru pendamping khusus (GPK).

Shadow teacher berperan membantu ABK dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler, baik melalui bimbingan individual, modifikasi materi, maupun penguatan motivasi belajar. Kehadiran *shadow teacher* sangat penting karena guru kelas reguler seringkali mengalami keterbatasan dalam memberikan perhatian penuh kepada ABK, mengingat jumlah siswa yang banyak dan keragaman karakteristik mereka. Dengan adanya pendamping khusus, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Saat ini terdapat 32 ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah. Berdasarkan dari sumber jambi.bps.go.id jumlah sekolah dasar negeri di Kota Jambi pada tahun 2019-2021 terdapat 164 sekolah, dan hanya terdapat 4 sekolah dasar negeri yang menjadi sekolah inklusi di Kota Jambi. Salah satu sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi di kota jambi yaitu Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi, yaitu bahwasannya sekolah ini sudah ditetapkan sejak

tahun 2006 sebagai sekolah inklusi. Sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi harus mempersiapkan diri dengan melakukan inovasi serta manajemen kurikulum yang baik. Oleh karena itu, peneliti memilih Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi sebagai lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana manajemen kurikulum inklusi yang digunakan di sekolah tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan. Setelah beberapa tahun SD Negeri 131/IV menerapkan sekolah sebagai sekolah inklusi, pada tahun ajaran 2025/2026 menggunakan kurikulum merdeka. Dari sisi manajemen kurikulum yang dilakukan oleh sekolah sudah terlaksana cukup baik. Namun, dari hasil observasi awal peneliti bahwa masih adanya terdapat permasalahan di dalam pengelolaan kurikulum, yaitu implementasi manajemen kurikulum inklusi dengan dukungan *shadow teacher* masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah pendamping yang memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga terjadi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, sarana dan prasana yang belum tercukupi, masih terdapat beberapa orang tua yang belum bisa menerima anaknya didampingi oleh *Shadow* yang ditetapkan oleh sekolah. Dari masalah diatas peneliti akan melihat bagaimana cara sekolah dalam memanajemen kurikulum untuk siswa inklusi dan siswa reguler.

Maka dari itu, peneliti akan melihat beberapa aspek penting yang berkaitan dengan manajemen kurikulum berupa aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di sekolah. Penelitian ini berjudul **“Manajemen Kurikulum Sekolah Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?
2. Bagaimana pengorganisasian kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?
3. Bagaimana pelaksanaan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?
4. Bagaimana pengawasan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui perencanaan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?
2. Untuk mengetahui pengorganisasian kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?
4. Untuk mengetahui pengawasan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Manajemen Kurikulum Sekolah Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis

Memberikan pengetahuan dan informasi umum mengenai manajemen kurikulum, terutama yang berkaitan dengan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus, serta dapat menjelaskan implementasi pendidikan inklusi di sebuah lembaga sekolah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Terhadap Sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam mengelola kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan merata.
- b. Terhadap Guru, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi manajemen kurikulum di sekolah inklusi, khususnya dalam hal perencanaan pembelajaran yang adaptif, pelaksanaan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, serta evaluasi yang inklusi. Guru dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih fleksibel.
- c. Terhadap Siswa, diharapkan seluruh siswa baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Manajemen kurikulum yang inklusi akan

mendorong terciptanya pembelajaran yang adil, setara, dan memfasilitasi perkembangan akademik dan sosial semua peserta didik secara optimal.

- d. Bagi Peneliti, dengan maksud melakukan penelitian ini dapat menambah pemahaman serta pengalaman yang lebih umum dalam manajemen kurikulum sekolah inklusi di sekolah dasar.